

Indonesia dan Peningkatan Peran Internasional

Angel Damayanti

Dekan Fisipol Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

Pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia akan berperan semakin besar di panggung regional dan internasional. Salah satunya, Indonesia akan menjadi ketua ASEAN tahun 2023. Pada saat yang sama, Indonesia juga akan menjadi ketua G-20, sebuah forum internasional yang beranggotakan 19 negara ekonomi maju ditambah Uni Eropa.

Posisi ketua ini menambah panjang daftar peran Indonesia di arena politik internasional. Indonesia saat ini juga masih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dan akan menjadi Presiden DK PBB selama satu bulan pada Agustus 2020, serta akan menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada 2020-2022.

Itu sebabnya, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan, dalam lima tahun ke depan, diplomasi Indonesia akan sangat sibuk (*Kompas*, 12/11/2019).

Peluang dan tantangan

Menjadi ketua dari organisasi regional dan forum internasional merupakan upaya Indonesia memenuhi amanat Pembukaan UUD 1945, yaitu ikut serta dalam memelihara dan menciptakan perdamaian dunia. Di satu sisi, hal ini akan mengangkat reputasi dan posisi tawar Indonesia. Namun, di sisi lain, dituntut kepiawaian dan komitmen Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif dan kolaboratif sekaligus bermanfaat konkret bagi rakyat Indonesia.

Sebagai anggota DK PBB dan akan menjadi Presiden DK PBB sepanjang Agustus 2020, Indonesia bertanggung jawab untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional.

Sebagai ketua G-20, Indonesia harus mampu mengoordinasikan kebijakan negara-negara anggotanya untuk menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara global serta mempromosikan peraturan-peraturan di bidang keuangan untuk mencegah terjadi krisis finansial.

Sebagai ketua ASEAN, Indonesia akan memimpin sejumlah pertemuan penting dan strategis para kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara ASEAN serta menteri-menteri terkait. Di samping itu, Indonesia juga harus aktif mempromosikan dan meningkatkan kepentingan serta kesejahteraan ASEAN, memastikan sentralitas dan kesatuan ASEAN, serta merespons setiap isu atau situasi kritis yang berkaitan dengan ASEAN.

Indonesia juga akan mewakili ASEAN dalam memperkuat dan meningkatkan hubungan baik dengan negara-negara mitra. Terkait dengan hal ini, Indonesia diharapkan dapat menggalang kekuatan ASEAN untuk tampil sebagai pemain kunci dan menentukan sikap dalam masalah-masalah strategis.

Dari peran-peran kawasan dan global itu, Indonesia menghadapi peluang sekaligus tantangan. Peluang yang ada memberikan sedikitnya dua keuntungan bagi Indonesia jika dapat dimanfaatkan dengan baik.

Pertama, Indonesia dapat memasukkan agenda yang dianggap penting dan strategis untuk didiskusikan bersama di tingkat regional dan global, baik itu agenda ekonomi maupun politik-keamanan.

Kedua, berbagai forum dan pertemuan yang diselenggarakan di Indonesia akan menggerakkan roda perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Di sisi lain, ada dua tantangan yang harus dihadapi. Pertama, Indonesia dituntut dapat mengakomodasi kepentingan bersama dan kepentingan negara-negara lain tanpa mengabaikan kepentingan nasional, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi serta perlindungan wilayah dan warga negara Indonesia.

Tantangan ini menjadi berat karena sejumlah negara memiliki kepentingan yang berbeda dan saling bertentangan sehingga menimbulkan ketegangan dan konflik.

Konflik Laut China Selatan, isu kepemilikan dan uji coba nuklir Korea Utara, perang dagang antara Amerika Serikat dan China, krisis kemanusiaan di Rakhine, konflik Israel-Palestina, serta masalah-masalah perbatasan merupakan beberapa ketegangan yang berkepanjangan sampai saat ini.

Untuk meminimalisasi ketegangan yang ada, selain berupaya memajukan kerja sama ekonomi serta konektivitas fisik, institusional dan hubungan antarmasyarakat, Indonesia harus mampu membawa negara-negara melihat pada keprihatinan yang menjadi kepentingan bersama.

Keprihatinan bersama yang diangkat dalam forum regional dan internasional akan jauh lebih efektif untuk dibahas dibandingkan dengan isu-isu sensitif yang sangat mungkin memicu dan atau meningkatkan ketegangan yang sudah ada.

Isu bersama

Beberapa di antara isu yang dapat dibahas bersama adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan secara masif. terutama di laut, sehingga dibutuhkan pemeliharaan dan pengelolaan laut secara bersama-sama. Tindak kejahatan oleh

aktor-aktor bukan negara, seperti pencurian ikan, pembajakan laut, penjualan narkoba dan senjata terlarang, penjualan manusia, terorisme, serta kejahatan siber, juga membutuhkan pengaturan dan penanganan bersama, baik di kawasan maupun internasional.

Kerugian sejumlah negara, termasuk Pemerintah Indonesia, yang mencapai triliunan rupiah akibat penangkapan ikan ilegal dan pembajakan di laut penting menjadi agenda dalam forum regional dan internasional. Belum lagi para nelayan di laut sekitar Pulau Bintan yang merugi akibat limbah bahan bakar kapal yang dibuang ketika kapal-kapal tersebut akan masuk ke perairan Singapura. Akibatnya, laut Indonesia tercemar, ekosistem terganggu, dan jaring para nelayan rusak.

Kemampuan menyelesaikan keprihatinan dan masalah-masalah bersama ini, selain memberikan manfaat yang langsung dan nyata dirasakan oleh masyarakat, juga akan membangun rasa kebersamaan dan saling percaya negara-negara, yang pada akhirnya menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lebih sensitif.

Kedua, dengan peranan yang semakin meningkat di mata internasional, terutama di kawasan Asia Tenggara, Pemerintah Indonesia dituntut bekerja keras, dan karena itu perlu didukung oleh semua pihak di dalam negeri. Sebagai bagian dari upaya diplomasi publik, pemerintah tidak saja harus piawai menjalankan tugas diplomasi ke luar, tetapi juga harus bisa membangun persepsi yang sama dan opini publik di dalam negeri tentang peranan Indonesia di kawasan dan global.

Oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri dan lembaga

terkait harus memastikan kesiapan masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam menjalankan perannya. Dalam hal ini, pemerintah perlu menggendeng para pengusaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, bahkan generasi milenial untuk terlibat dalam *multi-track* dan *digital diplomacy*.

Memfaatkan media sosial dan kemasan produk-produk yang digunakan oleh masyarakat sebagai sarana edukasi dan kampanye tentang posisi Indonesia sebagai ketua di ASEAN dan G-20—seperti dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Thailand—perlu segera dimulai. Hal itu akan membangun kesadaran masyarakat tidak saja tentang citra positif di mata internasional, tetapi juga arah politik luar negeri yang jelas, nyata, dan dapat dinikmati oleh semua rakyat Indonesia.

POJOK

Kredibilitas KPU tercoreng dugaan korupsi.
Urusin *coblos saja*, jadi tak kena coreng.

Netflix dukung film Indonesia mendunia.
Kuntilanak bisa segera bertemu drakula.

Laut menjadi sasaran pembuangan limbah.
Slogannya selama ini: buang ke laut saja, sih.

Mangkil